

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN LOGISTIK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI KABUPATEN MINAHASA

Rio Apolinaris Suatan
NPP. 29.1531

*Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: suatanryo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is surrounded by the world's ring of fire, so it has a high potential for disaster. One of the regions in Indonesia that has a high natural disaster risk index is Minahasa Regency. Natural disasters that often occur are landslides, floods, earthquakes and cyclones. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze the role of the Minahasa District Social Service in logistical assistance to victims of natural disasters in Minahasa District. **Method:** Qualitative research with descriptive method through inductive approach is the method chosen by researchers in collecting data by interview, observation and documentation. To be able to analyze the existing events, this research uses organizational role theory which focuses on the structure, members, interactions and goals of the organization. **Result:** The results of the study showed that the role of the Minahasa District Social Service in distributing logistical assistance for emergency response to natural disasters had been carried out well, but there were several obstacles due to the lack of human resources and limited budget. The efforts of the Minahasa District Social Service in overcoming obstacles are to strengthen the internal organization and cooperate externally with the Minahasa District BPBD. **Conclusion:** The role of the Minahasa District Social Service in carrying out logistical assistance to victims of natural disasters has been going well, it can be seen from the state of the organization of the Minahasa District Social Service regional apparatus which is well structured so that it can support the distribution of logistical assistance effectively. To increase the role of the Minahasa District Social Service in distributing logistical assistance is to utilize information technology and improve the quality of human resources through training in supporting the distribution of logistics assistance quickly and on target.

Keywords: Natural Disaster, Logistics, Minahasa Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Daerah Indonesia dialiri oleh jalur cincin api dunia sehingga memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana alam yang tinggi adalah Kabupaten Minahasa. Bencana alam yang sering terjadi adalah tanah longsor, banjir, gempa bumi dan puting beliung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam bantuan logistik kepada korban bencana alam di Kabupaten Minahasa. **Metode:** Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif adalah metode yang dipilih oleh penulis dalam pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk dapat menganalisis peristiwa yang ada penelitian ini menggunakan teori

peranan organisasi yang berfokus pada struktur, anggota, interaksi dan tujuan organisasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian didapatkan bahwa peranan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana alam sudah terlaksana dengan baik namun adanya beberapa hambatan akibat dari kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya anggaran. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam menanggulangi hambatan adalah dengan memperkuat internal organisasi dan bekerjasama secara eksternal dengan BPBD Kabupaten Minahasa. **Kesimpulan:** Peran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan bantuan logistik kepada korban bencana alam telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari keadaan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa yang terstruktur dengan baik sehingga dapat mendukung penyaluran bantuan logistik secara efektif. Untuk meningkatkan peran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam penyaluran bantuan logistik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dalam mendukung penyaluran bantuan logistik yang cepat dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Bencana Alam, Logistik, Kabupaten Minahasa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, itu ditunjukkan dari luas wilayah negara Indonesia dari seluruh negara yang ada di dunia, luas wilayah Indonesia berada pada posisi 15 dunia dengan jumlah luas wilayah daratan dan lautan adalah 1.904.569 km persegi. Luas daratan Indonesia mencapai 1,2 % dari luas keseluruhan daratan yang dimiliki bumi saat ini, keadaan tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia saat ini adalah berjumlah sekitar 272 juta jiwa. Keadaan tersebut didukung oleh letak geografis Indonesia adalah 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur dan diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga di setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yaitu angin muson barat dan timur, fakta tersebut juga memperkuat bahwa hanya memang ada dua musim yaitu musim panas dan musim hujan yang ditandai oleh angin musim yang terjadi setiap pada pertengahan tahun atau pada akhir tahun.

Dari keunikan letak geografis di Indonesia tersebut pada kenyataannya daerah-daerah dan pulau-pulau di Indonesia dilewati oleh daerah yang disebut dengan daerah cincin api (*ring of fire*) sehingga hampir seluruh daerah di seluruh pelosok pulau Indonesia berpotensi mendapatkan bencana gempa bumi dan risiko potensi terjadinya bencana tsunami. Bukan hanya potensi bencana gempa bumi dan tsunami, Indonesia juga berpotensi dalam risiko bencana lainnya yaitu seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung mengingat daerah-daerah Indonesia memiliki iklim muson yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan terjadinya ancaman dari badai *el-nino* dan *la-nina*. Potensi bencana alam di Indonesia juga tidak hanya pada peristiwa gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan banjir saja melainkan Indonesia juga mempunyai risiko bencana dari gunung berapi yang masih aktif yaitu berjumlah 127 gunung berapi aktif. Indeks risiko bencana nasional berdasarkan data BNPB pada tahun 2015-2019 berada pada tingkat sedang yaitu 137,1 (>144 = tinggi), bahkan di beberapa daerah di Indonesia masih banyak daerah provinsi di Indonesia yang masih memiliki indeks risiko bencana yang melebihi pada poin 144.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu daerah provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki ancaman bencana alam yaitu gempabumi, letusan gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Tetapi seiring perkembangan, manajemen penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Utara juga mengikuti tren positif yang ditunjukkan oleh data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan, data dari BNPB pada tahun 2020 berada kurang dari 144 yaitu berada pada poin 139,47. Berbanding terbalik dengan indeks risiko bencana dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2020 kabupaten/kota yang kelas risikonya berada >144, yaitu adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten Minahasa adalah salah satu Kabupaten yang tertinggi indeks risikonya yang setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa berada pada indeks risiko bencana paling tinggi dan selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Utara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Minahasa adalah Dinas Sosial yang juga sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu dalam hal kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan sosial, salah satu contohnya adalah korban yang terdampak bencana alam. Dampak dari bencana alam tersebut tentunya tidak terlepas dari jumlah kerugian yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang terkena terdampak baik itu berupa kerugian harta benda dan kerugian akibat hilangnya salah satu anggota keluarga maupun gangguan psikologi terhadap masyarakat per individu. Tentunya dengan manajemen logistik yang tepat, sinergitas yang mumpuni dengan lembaga pendukung penyaluran bantuan serta kerjasama dengan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa.

Peran Dinas Sosial kepada masyarakat yang terkena bencana dinilai masih kurang maksimal dan butuh pengoptimalan baik itu dari dalam dan luar dari sisi sumber daya manusia yang mengelola manajemen logistik yang terbilang jumlahnya yang masih kurang dalam sisi SDM nya maupun pengalaman yang dibutuhkan yang juga merupakan hal yang harus dimiliki karena mengingat daerah Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang paling tinggi angka indeks risiko bencana se-provinsi Sulawesi Utara. Keadaan tersebut dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tahun 2019 berjumlah 18 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 15 orang PNS, berdasarkan data Badan Pusat Statistika dari semua perangkat daerah di Kabupaten Minahasa jumlah PNS yang terbilang sedikit adalah salah satunya adalah Dinas Sosial karena pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah posisi 8 terbawah dengan jumlah pegawai negeri sipil yang paling sedikit.

Saat terjadinya bencana Dinas Sosial tidak hanya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentunya Dinas Sosial harus berkoordinasi juga dengan antara lain contohnya seperti kecamatan dan perangkat desa / kelurahan untuk mendapatkan data akibat bencana tersebut secara real yang berupa data jumlah keluarga yang terdampak dan jumlah kerugian yang ada, sehingga dengan bantuan logistik kepada korban bencana dapat terlaksana dan tepat sasaran. Sarana dan prasarana dalam penyaluran bantuan logistik juga masih belum memadai, salah satunya adalah alat transportasi yang disediakan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk mengangkut alat dan bahan bantuan ke tempat terjadinya bencana belum memadai mengingat jarak dan medan ke lokasi bencana yang tidak mendukung dan jumlah bantuan yang terbilang belu jelas jumlahnya.

Saat terjadinya bencana Dinas Sosial tidak hanya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentunya Dinas Sosial harus berkoordinasi juga dengan antara lain contohnya seperti kecamatan dan perangkat desa / kelurahan untuk mendapatkan data akibat bencana tersebut secara real yang berupa data jumlah keluarga yang terdampak dan jumlah kerugian yang ada, sehingga dengan bantuan logistik kepada korban bencana dapat terlaksana

dan tepat sasaran. Salah satu contoh kurangnya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial adalah masalah terkait data bencana alam pada tahun 2018-2020. Data yang ada pada BPBD berbeda dengan data yang ada di Dinas Sosial, ini ditunjukkan pada data jumlah bencana BPBD berbeda dengan data jumlah bencana Dinas Sosial. Ini tentu merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan karena mengingat BPBD dan Dinas Sosial adalah koordinator dalam pelaksanaan penyaluran bantuan logistik. Penyaluran logistik harus dilaksanakan secara cepat dan tepat dan apabila adanya miss-komunikasi ini sangat berdampak pada masyarakat yang menjadi korban bencana tersebut sehingga menjadikan penyaluran logistik menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, dimulai dari bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana sampai pada bagaimana saat memberikan bantuan kepada korban yang terdampak dari bencana tersebut. Penelitian Rizki Megawati yang berjudul *Santunan Dan Bantuan Korban Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur* (Rizki Megawati, 2013), penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang berfokus pada mekanisme atau prosedur pelayanan, konsistensi petugas, kemampuan petugas, dan kerjasama antar petugas Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana alam. Penelitian Abdul Rahman Dilapanga yang berjudul *Iklim Organisasi (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa)* (Abdul Rahman Dilapanga, 2019), penelitian ini mempunyai lokus penelitiannya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh peneliti karena penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada masalah internal dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, yaitu menganalisis bagaimana iklim organisasi yang berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa yang meliputi kepegawaian, kepemimpinan organisasi dan budaya yang merujuk pada kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Selanjutnya penelitian Muhammad Lukmanul Hakim yang berjudul *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran Di Kota Samarinda Tahun 2018* (Muhammad Lukmanul Hakim, 2021) yang penelitiannya berfokus pada peran Dinas Sosial sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana di bidang penyaluran bantuan khususnya kepada korban bencana kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, ini dapat dilihat dari adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar dari penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian terkait peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan penyaluran bantuan logistik yang merupakan kebutuhan utama korban bencana alam yang terdiri dari bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan ancaman tsunami yang harus segera diberikan kepada korban yang terkena dampak dari bencana alam tersebut secara cepat dan tepat berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal sementara, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang bantuan sosial dan santunan yang merupakan bantuan yang dilaksanakan pasca terjadinya bencana. Selanjutnya perbedaan yang ada pada penelitian ini adalah terletak pada peristiwa bencana yang diteliti yaitu keseluruhan bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa yaitu bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan ancaman tsunami sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bencana alam tertentu. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian yang juga merupakan perbedaan yang paling signifikan, sehingga dapat dilihat bahwa

perbedaan dari setiap penelitian mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dan cara penanganan yang berbeda yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Persamaan yang dapat dilihat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah setiap penelitian tentunya berfokus pada kinerja dan peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial dalam penyaluran logistik kepada korban yang terkena dampak bencana alam di Kabupaten Minahasa, untuk memahami apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penyaluran logistik bencana alam di Kabupaten Minahasa dan untuk mengetahui apa saja upaya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa saat menghadapi permasalahan dalam penyaluran logistik korban bencana alam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan induktif sehingga penulis dapat mengumpulkan data dan mencari informasi berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan yaitu sehingga dapat memperjelas fungsi dan tugas pokok dari Dinas Sosial dalam melaksanakan peran dalam penyaluran bantuan logistik terhadap korban bencana alam di Kabupaten Minahasa sehingga dalam penelitian ini penulis dapat mengumpulkan data sesuai dengan ciri penelitian kualitatif metode deskriptif yaitu dengan mencari fakta-fakta secara luas dan mendalam dengan menggunakan pendekatan induktif yang bersifat mempertajam hubungan dan merupakan struktur analisa yang memperhitungkan nilai yang diharapkan bersama secara eksplisit. Pelaksanaan penelitian secara kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif tersebut dianggap sesuai yaitu dengan mengklasifikasi, menganalisis dan mendapatkan kesimpulan dari khusus ke umum. Untuk menemukan temuan dalam permasalahan tersebut peneliti mendasari penelitian dengan melakukan analisa terhadap rumusan masalah dan mengaitkannya dengan tujuan dan kegunaan penelitian. (Sugiyono, 2013:4) Penelitian mempunyai 3 macam sifat yaitu: bersifat penemuan; bersifat pembuktian; dan bersifat pengembangan.

Teknik Pengmpulan data yang dipakai oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi sehingga ini sesuai dengan penjelasan dari Sugiyono (2013:225) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat di bagi menjadi 4 macam yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan atau gabungan atau tringulasi. Adapaun dalam menganalisis penelitian penulis menggunakan teori organisasi (Miftah Thoha, 2011:35) yang menyatakan bahwa peranan dalam organisasi dikenal sebagai uraian jabatan. Artian dari uraian jabatan tersebut berupa dokumen tertulis yang menjadi tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang mempunyai dimensi struktur, anggota, interaksi dan tujuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan peranan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana alam yang berpedoman pada pendapat dari Miftah Thoha yang menyatakan bahwa peranan dalam organisasi adalah uraiain jabatan yang meliputi tanggung jawab akan suatu pekerjaan secara terstruktur dan teratur, berdasarkan pendapat tersebut Miftah Thoha membagi peranan organisasi menjadi 4 dimensi yaitu struktur, anggota, interaksi, dan tujuan yang dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

Daerah Minahasa merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terkena dari bencana alam, hal ini ditunjukkan dengan indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa memiliki indeks risiko bencana terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Potensi – potensi dengan adanya bencana alam tersebut sangat mempengaruhi adanya gangguan

terhadap masyarakat Kabupaten Minahasa, bencana-bencana alam tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Minahasa yaitu bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi.

Tabel 3.1
Jumlah Bencana Alam Setiap Kecamatan di Kabupaten Minahasa tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Gempa Bumi
1	2	3	4	5
1	Eris	7	14	9
2	Kakas	6	10	17
3	Kakas Barat	-	1	3
4	Kawangkoan	-	2	-
5	Kawangkoan Barat	-	5	10
6	Kawangkoan Utara	-	4	-
7	Kombi	-	-	-
8	Langowan Barat	-	-	-
9	Langowan Selatan	-	7	2
10	Langowan Timur	3	2	2
11	Langowan Utara	-	-	-
12	Lembean Timur	-	-	-
13	Mandolang	-	4	3
14	Pineleng	5	4	-
15	Remboken	8	-	4
16	Sonder	4	7	-
17	Tombariri	-	-	-
18	Tombariri Timur	-	-	-
19	Tombulu	2	9	22
20	Tompaso	-	-	10
21	Tompaso Barat	1	-	3
22	Tondano Barat	4	-	8
23	Tondano Selatan	2	2	1
24	Tondano Timur	3	1	11
25	Tondano Utara	-	4	13
	Jumlah	45	76	118

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka 2021, diolah oleh peneliti

Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Minahasa menurut kecamatan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kecamatan yang paling sering terjadinya bencana alam adalah Kecamatan Kakas dan Kecamatan Tombulu yang masing – masing dari kecamatan tersebut memiliki jumlah bencana sebanyak 33 kasus dalam 3 tahun terakhir. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kejadian bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Minahasa adalah bencana gempa bumi yaitu sebanyak 118 kasus, diikuti oleh kasus bencana tanah longsor sebanyak 76 kasus dan bencana banjir sebanyak 45 kasus.

Sesuai dengan penjelasan Lambert dkk (1998) dalam Agustina dkk (2019:47) logistik merupakan rantai pasokan yang direncanakan, pelaksanaan, dan mengatur dalam penyimpanan barang serta layanan melalui informasi yang terkait sehingga proses menjadi efektif dan efisien dimulai dari

tahapan pendistribusian sampai pada konsumsi kepada konsumen. Berdasarkan dengan pendapat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dimulai dari pelayanan sampai dengan pendistribusian logistik kepada korban bencana alam. Berikut adalah data bantuan logistik dari Dinas Sosial dalam melaksanakan bantuan sosial kepada korban bencana alam, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Bantuan Logistik Korban Bencana Alam
Di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Nama Barang	Volume	Satuan
1	2	3	4	5
1.	2019	1. Beras	20	Kg
		2. Ikan kaleng	7	Kaleng
		3. Mie instant	1	Dos
		4. Susu bubuk	10	Saset
		5. Gula pasir	2	Kg
		6. Biskuit	1	Kaleng
		7. Telur ayam	1	Bak
		8. Minyak goreng	2	Liter
		9. Sabun mandi	3	Buah
		10. Deterjen	1	Kg
		11. Handuk	3	Lembar
		12. Selimut	3	Lembar
		13. Peralatan masak	9	Buah
2.	2020	1. Beras	20	Kg
		2. Ikan kaleng	7	Kaleng
		3. Mie instant	1	Dos
		4. Kecap	4	Botol
		5. Minyak goreng	2	Liter
		6. Selimut	1	Buah
		7. Makanan siap saji	1	Buah
3.	2021	1. Beras	5	Kg
		2. Gula	1	Kg
		3. Ikan kaleng	9	Kaleng
		4. Mie instant	20	Bungkus

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, diolah oleh peneliti

3.1. Peranan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam Di Kabupaten Minahasa

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terkait Peranan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam Di Kabupaten Minahasa, peneliti dapat merumuskannya dalam pembahasan yang didasari oleh teori organisasi yang dikemukakan oleh Miftah Thoha sebagai pedoman dalam memecahkan masalah. Dalam teori organisasi Miftah Thoha (2011:35) terbagi menjadi 4 dimensi yaitu Struktur, Anggota, Interaksi, dan Tujuan,

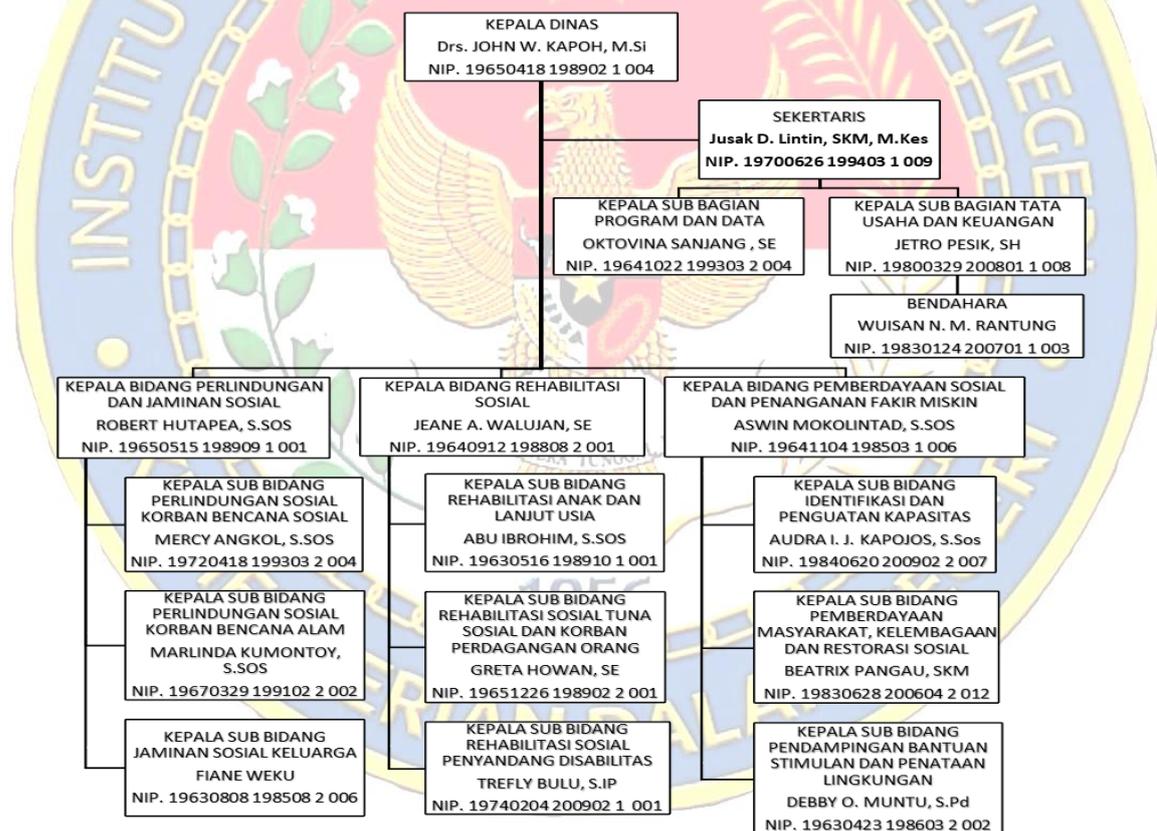
sehingga dengan adanya dimensi-dimensi dari teori tersebut peneliti dapat menganalisis dan mengevaluasi peran dari dinas sosial dalam membantu terpenuhinya kebutuhan kepada korban bencana alam di Kabupaten Minahasa.

3.1.1. Struktur

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 3 membagi tipe Dinas Sosial yang berdiri di Kabupaten/Kota berdasarkan beban kerja yaitu tipe A untuk intensitas beban kerja tinggi, tipe B untuk intensitas beban kerja sedang dan tipe C yaitu intensitas beban kerja ringan. Untuk menentukan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial berdasarkan tipenya sesuai pada pasal 4 yang dilihat dari faktor kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut.

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 12 melalui susunan organisasi dan tata kerja Dnas Sosial Kabupaten Minahasa pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2022



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

3.1.2. Anggota

Anggota adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu organisasi (Miftah Thoha 2011:35), dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota sebagai pengelola dari jalannya organisasi tersebut. Dengan adanya anggota organisasi dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dapat menyelenggarakan dan mengelola setiap-setiap bidang dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Minahasa.

Gambar 3.2
Jumlah Anggota Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2019, 2021 dan 2022



Berdasarkan dari gambar 3.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota pegawai Dinas Sosial Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 berjumlah 18 pegawai, tahun 2019 berjumlah 15 pegawai sedangkan pada tahun 2022 jumlah pegawainya adalah 17 pegawai.

3.1.3. Interaksi

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam penyaluran bantuan logistik bencana alam bersinergitas bersama BPBD Kabupaten Minahasa selaku koordinator dalam penanggulangan bencana. Dalam memberikan bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana alam tentunya harus memiliki data jumlah kasus bencana namun data awal yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya perbedaan jumlah kasus bencana alam dari BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Tabel 3.3
Data Bencana Alam BPBD Dan Dinas Sosial Tahun 2018-2020

Perangkat Daerah	Bencana Per Tahun	Jumlah Peristiwa Bencana
BPBD	2018	26
	2019	42
	2020	9
Dinas Sosial	2018	18
	2019	6
	2020	4

Sumber: BPBD Kabupaten Minahasa dan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Keterangan dari table tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan data jumlah peristiwa bencana BPBD Kabupaten Minahasa dan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Dinas Sosial memiliki tugas untuk melayani masyarakat di bidang sosial dalam hal ini adalah bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut, sedangkan BPBD adalah koordinator dalam penanggulangan bencana yang mengatasi setiap kejadian bencana. Data bencana alam yang terjadi di Kabupaten Minahasa merupakan hal yang harus diperhatikan, mengingat dengan adanya data yang faktual yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan sering mengalami miss-communication antar organisasi pemerintahan. Tentunya ini sangat berdampak

pada penyaluran bantuan logistik yang kurang maksimal dan kurang tepat sasaran kepada masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut.

3.1.4. Tujuan

Setiap organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk mewujudkan tujuan yang ada, melalui program-program yang ada suatu organisasi juga dalam mewujudkan tujuan lewat programnya yang diperkuat dengan adanya regulasi. Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tahun 2019-2023 menjelaskan fungsi dan tugasnya yang merupakan unsur penyusun dalam mendapatkan tujuan, ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa sesuai dengan RPJMD 2019-2023 yaitu sektor ekonomi, melestarikan budaya, adil dan sejahtera.

1. Dalam bidang ekonomi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa memiliki beberapa program dalam mendukung terwujudnya pembangunan dalam sektor ekonomi. Salah satu contohnya adalah pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja kepada masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan program tersebut Dinas Sosial dapat mewujudkan tujuannya yaitu dalam bidang perekonomian.
2. Dalam sektor kebudayaan tentunya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempunyai program dalam bidang pemberdayaan sosial. Salah satu programnya adalah pemberdayaan sosial kepada komunitas terpencil, tentunya dengan program ini bertujuan untuk dapat menjalin hubungan dan pengetahuan kepada masyarakat yang tersisihkan dari perkotaan lewat pendekatan kebudayaan dan adat istiadat setempat.
3. Adil dan Sejahtera merupakan tujuan yang paling penting jika dilihat dari tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tentunya beberapa program dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mengarah pada tujuan tersebut seperti pemberdayaan masyarakat miskin, bantuan kepada korban bencana dan lain – lain.

3.2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penyaluran Logistik Bencana Alam Di Kabupaten Minahasa

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tentunya memiliki faktor – faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.2.1. Faktor Pendukung

1. Peran Pemerintah

a) Kementerian Sosial, dalam membantu terselenggaranya penyaluran logistik kepada korban bencana alam, apabila terjadi bencana yang dikategorikan sebagai bencana berskala besar tentunya kementerian sosial dalam hal ini adalah pemerintah pusat memberikan beberapa bantuan seperti pendanaan, bantuan alat dapur, bantuan makanan cepat saji, tenaga kesehatan dan lain - lain

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana.

c) TNI/Polri, adalah salah satu unsur penyusun NKRI dalam segala bentuk bantuan, bantuan yang dimaksudkan adalah salah satunya adalah bantuan dalam penyaluran bantuan logistik yaitu dengan bantuan TNI/Polri beberapa kejadian bencana dapat terbantu yaitu salah satu contohnya adalah masyarakat lebih cepat terkoordinir dan bantuan dalam merehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Peran Masyarakat

a) Taruna Siaga Bencana (Tagana), tagana adalah salah satu program yang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Sosial, pedoman tagana terdapat pada Permensos Nomor 28 tahun 2012

tentang Pedoman Umum Tagana. Tugas pokok Tagana pada saat tanggap darurat yakni dibidang Logistik, Shelter dan Dapur Umum.

c) Masyarakat Setempat, dalam penyaluran bantuan logistik tentunya dalam setiap desa pasti adanya masyarakat sukarelawan yang bersedia untuk mengeluarkan tenaga serta waktu dalam penanganan bencana.

3.2.2. Faktor Penghambat

1. Sarana Prasarana, keadaan 2 mobil truk yang diberikan Kementerian Sosial tersebut dalam kondisi tidak bisa digunakan dikarenakan kurangnya perawatan, mobil treuk yang digunakan dalam membantu penyaluran bantuan logistik hanya satu mobil saja, sehingga menurut Sekretaris Dinas Sosial Bapak Jusac D. Lintin, SKM, M.Kes bahwa sarana dan prasarana dalam penyaluran bantuan logistik belum cukup memadai.

2. Anggota Pegawai, berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis bahwa jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah berjumlah 17 orang. Tentunya menurut temuan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Minahasa memiliki jumlah pegawai yang kurang lebih sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Anggaran, tentunya dalam menjalankan suatu organisasi perlu adanya manajemen keuangan dalam program dari kinerja organisasi tersebut sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah disusun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menemukan bahwa adanya kekurangan anggaran sehingga berdampak pada seluruh sektor dalam penanggulangan bencana baik dalam sektor sarana dan prasarana maupun sektor sumber daya manusianya.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penyaluran Logistik Bencana Alam Di Kabupaten Minahasa

Dalam mengatasi setiap hambatan yang ada tentunya adanya upaya dalam mengusahakan terwujudnya tujuan-tujuan dalam organisasi, yaitu salah satunya adalah upaya dalam penanggulangan bencana terkhusus pada penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana alam di Kabupaten Minahasa.

1. Sarana dan Prasarana, dalam melaksanakan penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana alam tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyaluran bantuan menjadi lebih efektif. Untuk menyikapi keadaan sarana dan prasarana yang kurang maka Dinas Sosial memanfaatkan kendaraan – kendaraan pribadi dan kendaraan dinas pribadi seperti mobil dan motor untuk membantu mensurvei dengan jelas lokasi bencana yang terjadi dan untuk membantu menyalurkan bantuan dengan cepat menggunakan kendaraan yang ada.

2. Anggota, upaya yang dilakukan sehingga pembagian tugas yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa bisa berjalan dengan baik adalah dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan jumlah tenaga harian lepas (THL) agar dapat membantu setiap kegiatan administrasi dan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan.

3. Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang memerlukan manajemen administrasi terkait hal dengan pendanaan. Dalam permasalahan yang terjadi terkait anggaran yang belum mencukupi Dinas Sosial mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa atau pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial untuk mendapatkan anggaran yang mencukupi dalam penanggulangan bencana terlebih untuk membantu dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Minahasa.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam penyaluran bantuan logistik pada saat terjadinya bencana alam tentunya sangat berpengaruh, mengingat bahwa BPBD yang bertindak sebagai koordinator kebencanaan harus mengikutsertakan Dinas Sosial dalam program penyaluran bantuan logistik karena ini menyangkut masyarakat yang ketika terkena bencana perlu adanya perhatian khusus di bidang sosial. Masyarakat yang terkena bencana tentunya keadaannya sangatlah beragam, dimulai dari kehilangan tempat tinggal, kekurangan bahan makanan maupun kehilangan anggota keluarga atau kehilangan nyawa, tentunya hal tersebut harus diseimbangi oleh manajemen kebencanaan yang baik dalam hal ini dalam pemberian bantuan logistik. Demi meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program bantuan logistik kepada korban bencana alam tentunya perlu adanya penguatan internal perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa sama halnya yang ditemukan oleh Dilapanga pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawan (Abdul R. Dilapanga, 2019)

Pada penelitian Muhammad Lukmanul Hakim yang berjudul *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran Di Kota Samarinda Tahun 2018* (Muhammad Lukmanul Hakim, 2021) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Dinas Sosial dalam penanganan bencana tidak hanya pada peristiwa tanggap darurat saja melainkan peran Dinas Sosial sangat signifikan sebelum terjadinya bencana (pra bencana), saat terjadinya bencana (tanggap darurat) dan saat setelah terjadinya bencana (pasca bencana). Penelitian tersebut menemukan bahwa perlu adanya perhatian pemerintah di bidang sosial yaitu dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, oleh karena itu dalam penyelenggaraan bantuan bagi korban kebakaran diperlukan langkah penanganan baik pada masa pra, saat dan pasca bencana yang dijelaskan sebagai berikut : (1) Masa pra bencana, menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan darurat korban ketika terjadi bencana dengan penyediaan bufferstock (bahan permakanan, sandang dan peralatan dapur); (2) Masa bencana, bantuan bagi korban kebakaran sangat diperlukan karena korban dalam kondisi panik, kehilangan harta benda termasuk rumah yang musnah atau rusak; (3) Mengamati apa saja kekurangan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor yang dapat menghambat penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut adalah masih banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana prosedur dan kriteria masyarakat yang harus diberikan bantuan logistik terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kurang lengkapnya data masyarakat rentan dari pemerintah desa/kelurahan yang membutuhkan perhatian khusus saat terjadi bencana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari penelitian yang sudah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa untuk terselenggaranya bantuan logistik kepada korban bencana alam secara cepat dan tepat sasaran perlu adanya standarisasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat akan prosedur pelaksanaan bantuan logistik menjadi terarah dan tidak semrawut. Pelaksanaan program bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut

sudah berjalan dengan baik tetapi perlunya adanya penguatan internal yang meliputi interaksi Dinas Sosial dan penguatan eksternal yang meliputi sinergitas Dinas Sosial demi tercapainya penyaluran bantuan logistik secara cepat dan tepat. Dengan adanya program Taruna Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat meningkatkan kedekatan masyarakat akan adanya partisipasi pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan BPBD Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan manajemen kebencanaan dalam hal pemberian bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana alam secara efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah waktu, biaya dan keadaan pandemi covid 19 yang sedang terjadi di Indonesia

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari perlu adanya pengembangan penelitian di kemudian hari, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokus yang menjadi penelitian penulis yaitu Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mengenai penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana alam untuk mendapatkan hasil yang terbaru dan lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa beserta jajarannya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dengan baik serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiyoso, Wignoyo. 2018. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Agustina, Lidya. dkk. *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi Dan Sektor Potensial*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Arikanto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Berg, Bruce L. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. United State of Amerika: California State University
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Taufiq. 2010. *ABC Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kementerian PTN dan RB
- Garside, Annisa K. dan Dewi Rahmasari. 2017. *Manajemen Logistik*. Malang: UMM Press
- Indiyanto, A. dan Arqom, Kuswanjono. 2012. *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Bandung: Mizani Media Utama
- _____. 2012. *Respons Masyarakat Lokal Atas Bencana*. Bandung: Mizani Media Utama
- Kurniadi, Bayu D. 2011. *Praktek Penelitian Kualitatif Pengalaman Dari UGM*. Yogyakarta: PolGov
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- _____. 2013. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Indonesia*. Malang: UB Press
- Siyoto, S. dan Muhammad Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Suaedi. 2016. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: IPB Press

Sugiarti, E. Andalas dan Arif Setiawan. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: UMM Press

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2016. *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis dan Konteks Pengembangannya*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia

Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

_____. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Wiratno. 2005. *Nahkoda Leadership Dalam Organisasi Konservasi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI

Yunus dan Wahyudin, Nawawi. 2013. *Teori Organisasi*. Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka

SKRIPSI DAN JURNAL

Syauqi. 2016. “Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Sosial”. Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Sosial RI

Megawati, R. 2013. “Santunan dan Bantuan Korban Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur”. eJournal Pemerintahan

Hakim, M. L., 2021. “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran Di Kota Samarinda Tahun 2018”.

Dilapanga, A. R., 2019. “ Iklim Kerja Organisasi (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa)”. eJournal unima

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Pedoman Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

SUMBER LAINNYA

<https://bnpb.go.id/berita/indeks-ketahanan-daerah-untuk-monitoring-indeks-risiko-bencana>
diakses pada tanggal 04 September 2021

http://bencanapedia.id/Pemetaan_Risiko#:~:text=Manfaat%20adanya%20pemetaan%20risiko%20bencana,menjadi%20dasar%20bagi%20pemerintah%20dalam
diakses pada tanggal 04 September 2021

<https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf> diakses pada tanggal 04 September 2021

<https://dpmptsp-minahasa.id/tentang-pm-ptsp/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021

<https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-operasional/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15995730687808.pdf> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

<https://slideplayer.info/slide/11929182/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>

<https://minahasakab.bps.go.id>

